

# KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Hartini**

*hartinisultan@gmail.com*

*Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The National Narcotics Agency of Central Sulawesi province with the task of preventing, eradicating, misusing and illicit drug trafficking needs to be addressed throughout the society, addressing this, it is expected that all elements of society will cooperate in prevention, eradication and illicit drug trafficking, so that the vision of the National Narcotics Agency of Central Sulawesi province will be realized to realize the Central Sulawesi net of narcotics in 2017. The objective of this research is to find out the performance of National Narcotics Agency of Central Sulawesi province had not been run effectively and efficiently which was reviewed based on Dwiyanto's organizational performance theory model using variables: 1). Productivity, 2). Quality of Service, 3). Responsibility, 4). Responsiveness, 5). Accountability. The type of research used was qualitatively with the number of informants was 5 people selected by purposive sampling. The data were collected through observation, interview and documentation by analyzing the results of all interviews. The results of the research show that the performance of National Narcotics Agency of Central Sulawesi province has not been fully optimized. Seen from the five performance criteria refers to Dwiyanto, the criteria that run well were productivity, quality of service, responsibility, and accountability. While the criteria is not optimal on the performance of National Narcotics Agency of Central Sulawesi province is responsiveness there are some obstacles faced by the rehabilitation sector where there are still rehabilitation institutions that have been given reinforcement but have not yet operated, while for the target number of abusers, victims of abuse and narcotics addicts who undergo post-rehabilitation services have not yet proceeded properly.*

**Keywords:** *Productivity, Quality of Service, Responsibility, Responsiveness Accountability*

## **PENDAHULUAN**

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak terkait selalu dilibatkan dalam proses diperoleh informasi tentang pencapaian hasil dan misi organisasi. Disamping itu dengan

adanya komunikasi yang efektif juga dapat memunculkan ide-ide baru yang dapat dijadikan masukan-masukan bagi penyempurnaan tugas-tugas organisasi sekaligus bagaimana cara pencapaiannya.

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak, ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja. Mahmudi (2005) menjelaskan bahwa kinerja akan diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap kualitas yang diberikan. Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian kinerja disektor publik antara lain : Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi Menyediakan sarana pembelajaran pegawai Memperbaiki kinerja berikutnya Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan Memotivasi pegawai (meningkatkan motivasi pegawai) Menciptakan akuntabilitas publik. Selain itu pengukuran kinerja juga merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi, melalui penilaian indikator-indikator kinerja dapat berfungsi untuk mengukur kinerja organisasi untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu, dan merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses (Mahmudi, 2005), dalam LAN

Wardika (2004) meneliti tentang Kinerja Puskesmas di Kota Denpasar, ditinjau dari empat perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio keuangan dengan rumus efektivitas, sarana dan prasarana, kepuasan pengunjung dan karyawan dengan menggunakan skala Niven. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah cukup baik.

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Untuk menunjang penulisan tesis

ini, harus diperhatikan jenis penelitian apa yang sebaiknya digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku,kejadian, tempat dan waktu.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi narasumber atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian, karena mereka tidak hanya menjawab pertanyaan secara pasif, tetapi secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti yang peneliti ciptakan. Instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri.

- b. Kualitas Layanan, yaitu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
- c. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- e. Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

birokrasi politik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

## METODE

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi tersebut, penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik pemilihan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menentukan informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan-informan yang dibutuhkan sebagai sumber data berdasarkan asumsi bahwa informan tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan oleh calon peneliti.

Berdasarkan hal tersebut sehingga peneliti menentukan 5 orang informan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang dianggap mempunyai kompetensi dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai informan adalah sebagai berikut :

- Kepala Bagian Umum : 1 Orang
  - Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat : 1 Orang
  - Kepala Bidang Rehabilitasi : 1 Orang
  - Kepala Bidang Pemberantasan: 1 Orang
  - StafSub Bagian Perencanaan : 1 Orang
- Jumlah : 5 Orang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Produktifitas

Adapun yang diukur dari sejauh mana kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan masyarakat. Setiap organisasi baik berbentuk perusahaan maupun lainnya akan selalu berupaya agar para anggota atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan organisasi dapat memberikan prestasi dalam bentuk produktivitas kerja yang tinggi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas kerja merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam perencanaan pengembangan industri pada khususnya dan perencanaan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Pengertian produktivitas pada umumnya lebih dikaitkan dengan pandangan produksi dan ekonomi, sering pula dikaitkan dengan pandangan sosiologi. Tidak dapat diingkari bahwa pada akhirnya apapun yang dihasilkan melalui kegiatan organisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya tenaga kerja itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disajikan hasil wawancara antara peneliti dengan informan I (Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Prop. Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Kesadaran para pegawai dilingkungan BNNP Sulteng Akan tugas pokok dan fungsinya sudah semakin tinggi sehingga perencanaan kegiatan yang akan dilakukan sudah semakin cermat, efektif dan efisien, Hanya saja dalam hal Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dibeberapa bidang masih belum sesuai timeline sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap sepenuhnya. Hasil evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. (Masnawati Rahman, SE,MM, Tgl 6 desember 2018)*

Hal senada disampaikan Informan 5 (Staf Sub Bagian Perencanaan BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Adanya beberapa kali pergantian pimpinan dilingkungan BNNP Sulteng kurun waktu 2017*

sehingga menyebabkan revisi anggaran serta perubahan target/volume dan timeline kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya (Dewi Qadriani, SE, Tgl 6 Desember 2018)

Hal senada disampaikan oleh informan 2 (Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Pencapaian masyarakat yang terpapar informasi P4GN terlihat dari banyaknya orang yang mendapatkan informasi P4GN melalui kegiatan diseminasi informasi baik melalui media konvensional, media cetak, media penyiaran maupun media online. (Ati Makka, SKM, Tgl 6 Desember 2018).*

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa masyarakat Sulawesi tengah sdh dapat menerima program dan kegiatan yang diadakan oleh BNNP Sulteng khususnya program P4GN.

Hal senada disampaikan oleh informan 1 (Kepala Bagian Umum BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN untuk tahun 2018 dari target 6% mencapai realisasi 26,44% dengan perhitungan jumlah yang mendapatkan informasi dibagi dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah : 772.449 : 2.921.715 X % = 26,44% (Masnawati Rahman, SE, MM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 4 (Kepala Bidang Pemberantasan) yang mengatakan bahwa :

*Hal ini dapat dilihat dengan terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika dari target 18 Berkas Perkara terealisasi 56 Berkas perkara atau 311,11% (Baharuddin, SE, M.Si, Tgl 6 Desember 2018).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terbukti bahwa pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan secara maksimal sesuai dengan timeline. Dalam hal ini Peneliti

berpendapat agar kinerja dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Perlu adanya kerja sama dalam semua bidang dalam menyusun dokumen perencanaan.
2. Perlu adanya komitmen dari para Kepala Bidang dalam mempertanggungjawabkan program kerja yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan sangat produktifitas.

## **2. Kualitas Layanan**

Kualitas pelayanan merupakan standard yang harus diupayakan apabila kantor ingin memberikan kontribusi yang optimal pada pemakai jasa layanan.

Dalam penelitian Kinerja ini kualitas layanan yang dimaksud mengacu pada tanggung jawab penyelenggara kebijakan tersebut, dalam hal ini Bidang rehabilitasi sebagai tempat penanganan penyalahguna atau pecandu narkoba agar tidak kembali lagi mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2019.

Demikian disampaikan oleh informan 3 (Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Sebenarnya kami sudah melakukan TOT kepada beberapa lembaga pemerintah namun Kompetensi sumberdaya manusia yang ada belum memadai pada lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan sehingga tidak dapat melakukan pelayanan rehabilitasi. (Oslan Daud,, SKM, MPH Tgl 6 Desember 2018).*

Hal ini diperkuat oleh informan 1 (Kepala Bagian Umum) yang mengatakan bahwa :

*Program dan kegiatan yang dilaksanakan di lapas dan Bapas setelah dievaluasi ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan dimana masih banyak penghuni lapas atau bapas yang mengkonsumsi atau malah sebagai bandar*

*narkoba, sehingga kami perlu merevisi anggaran dan kegiatan tersebut. (Masnawati Rahman, SE,MM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 4 (Kepala Bidang Pemberantasan) yang mengatakan bahwa :

*Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang telah diberi penguatan sehingga pelaksanaan pelayanan pasca rehab belum berjalan secara optimal. (Baharuddin, SE, M.Si, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan Informan 5 (Staf Sub Bagian Perencanaan BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Anggaran yang tersedia pada kegiatan layanan rehabilitasi tidak terserap sepenuhnya dikarenakan pelaksanaan revisi anggaran dan kegiatan sdh diakhir tahun anggaran. (Dewi Qadriani, SE, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 2 (Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Untuk melayani setiap permintaan sebagai pemateri pada masyarakat, OPD, Instansi swasta kami selalu berusaha untuk dapat menghadiri kegiatan tersebut walaupun lokasinya sangat jauh demi untuk menjadikan masyarakat sulteng bersinar.(Ati Makka, SKM, Tgl 6 Desember 2018)*

Di sisi lain peningkatan pelayanan publik juga tidak lepas dari upaya perubahan dari SDM organisasinya, sebagaimana dikatakan John Dilulio (1994) bahwa *deregulating the public service means changing personnel and procurement employes.*

Mencermati dari hasil wawancara di atas peneliti berkesimpulan bahwa semua bagian maupun bidang pada BNNP Sulteng sangat mendukung tercapainya kinerja yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat langsung dengan keterlibatan semua bidang dan bagian dalam pelaksanaan Kegiatan baik yang ada anggarannya (DIPA) maupun yang tidak ada

anggarannya (non DIPA). Harapan kedepan bagi peneliti tentunya di Sulawesi tengah dapat dibangun panti rehabilitasi milik instansi pemerintah agar para penyalahguna dapat direhabilitasi dengan baik tanpa biaya yang banyak. Dalam hal ini peneliti berkesimpulan bahwa kinerja BNNP Provisi Sulawesi tengah dalam melayani masyarakat berhasil dengan baik sesuai dengan SOP.

### 3. Responsivitas

Responsivitas kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan 2 (Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) menyatakan bahwa :

*BNNP Sulteng memperhatikan tanggapan dari masyarakat yang merasa pelayanan diberikan kurang atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Apabila BNNP menerima tanggapan maupun umpan balik dari masyarakat akan diterima dengan baik dengan terlebih dahulu tentunya mempelajari permasalahan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Setelah itu akan diadakan pembenahan terhadap komplain sesuai dengan ketentuan yang ada (Ati Makka, SKM, Kep, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal ini disampaikan pula oleh informan 1 (Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Dalam rangka meningkatkan citra pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, saya selalu tekankan kepada bidang Rehabilitasi, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan selaku pelaksana teknis program P4GN agar selalu tanggap pada permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Apabila ada pengaduan dari pemohon, untuk segera*

*menindaklanjutinya (Masnawati Rahman, SE, MM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 3 (Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Ada beberapa hambatan yang dihadapi Bidang Rehabilitasi dimana masih ada lembaga rehabilitasi yang sudah diberi penguatan namun belum beroperasi, disamping itu juga kurangnya kesadaran pecandu narkoba untuk berobat/lapor diri sehingga jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi kurang dari target, adanya pasien rehabilitasi yang tidak melakukan rehabilitasi sempurna (tidak menyelesaikan rangkaian pelayanan rehabilitasi hingga selesai). (Oslan Daud, SKM, MPH, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 5 (Staf Sub Bagian Perencanaan BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Untuk target jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi belum berjalan sebagaimana mestinya, ini menandakan bahwa program ini tdk mencapai target, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pasien yang telah melakukan program rehabilitasi untuk melakukan program pascarehabilitasi. (Dewi Qadriani, SE, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 4 ((Kepala Bidang Pemberantasan) yang mengatakan bahwa :

*Untuk melakukan TAT kami selalu mendapat kendala ini disebabkan tim asesmen yang berasal dari polri, kejaksaan, kehakiman dan pengadilan selalu terkendala waktu sehingga pelaksanaan asesmen selalu tertunda. (Baharuddin, SE, M.Si, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal ini menggambarkan bahwa Kinerja BNNP dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan harapan namun masih ada kendala-kendala yang harus dibenahi.

Dari hasil wawancara tersebut diatas peneliti berharap :

1. Adanya Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga yang melaksanakan pasca

rehabilitasi melalui kegiatan penguatan dari BNN.

2. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan program Rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.
3. Perlu adanya sumber daya manusia yang provisional untuk mendukung terlaksananya program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi di BNNP Sulteng.

#### **4. Responsibilitas**

Dari hasil wawancara dengan informan 5 (Staf Subbag Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) menyatakan bahwa :

*Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sudah mampu merespon terhadap keluhan masyarakat dalam penyalagunaan narkoba yang selalu meresahkan ketentraman masyarakat dan dapat menimbulkan bahaya yang merugikan sosial budaya yang ada di Sulteng ini ditandai dengan banyaknya penyalahguna yang lapor diri di klinik pratama mosipakabelo milik BNNP Sulteng (Moh. Taufan, Tgl 6 Desember 2018).*

Hal ini diperkuat dengan informan 1 (Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah yang ada sekarang ini sebetulnya sudah bagus, dalam merespon terhadap adanya kejahatan narkoba namun perlu ditingkatkan lagi dalam hal melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat khususnya generasi yang belum mengerti tentang bahaya yang di timbulkan oleh penggunaan narkoba. (Masnawati Rahman, SE,MM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan informen 3 (Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Kompetensi sumberdaya manusia yang ada sudah memadai pada lembaga rehabilitasi yang diberi penguatan sehingga mereka dapat melakukan pelayanan rehabilitasi. Disamping itu juga lembaga rehabilitasi yang diberi*

*penguatan tahun sebelumnya masih tetap melaksanakan pelayanan terhadap pasien Penyalahguna narkoba. (Oslan Daud, SKM, MPH, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan informen 2 (Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Tingginya minat masyarakat dalam kegiatan yang kita lakukan selama ini khususnya terkait pembinaan/pengembangan kapasitas (life Skill) dikarenakan sesuai dengan sumber daya yang ada di kawasan rawan penyalahgunaan narkoba. (Ati Makka, SKM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada disampaikan oleh informan 4 (Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah) yang mengatakan bahwa :

*Aparat yang melaksanakan tugas di ruang tahanan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dengan jumlah tahanan yang masuk dan keluar sama banyaknya dalam artian tidak ada yg meninggal dunia. (Baharuddin, SE, M.Si, Tgl 6 Desember 2018).*

Ini menandakan bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional provinsi Sulawesi Tengah selaku garda terdepan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba di Sulawesi Tengah sangat baik, ini ditandai dengan menurunnya angka prevalensi penyalahguna narkoba dari tahun ketahun dan juga selalu merespon terhadap keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan Narkoba.

## 5. Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna. Yang diukur dari tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki *stake holders*, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas berikut di sajikan hasil wawancara responden mengenai akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Tengah terhadap pelayanan masyarakat,

Menurut hasil wawancara dengan informan 3 (Kabid Rehabilitasi BNNP Sulteng) mengatakan bahwa :

*Dalam hal kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam melayani masyarakat dapat dikategorikan sudah baik, ini dapat dilihat dari banyaknya pasien yang lapor diri di klinik pratama BNNP Sulteng selang tahun 2017 sebanyak 522 orang, terdiri dari 458 laki-laki dan 64 perempuan. (Oslan Daud, SKM, MPH, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal ini diperkuat oleh informan 2 (Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang mengatakan bahwa :

*Untuk kegiatan pelaksanaan tes urine kepada OPD baik instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga pendidikan maupun masyarakat yang melakukan Tes Urine sebanyak 480 ini dilakukan dari permintaan OPD maupun masyarakat baik melalui DIPA BNNP maupun mandiri atas kemauan mereka (Ati Makka, SKM, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal senada dikatakan pula oleh informen 1 (Kabag Umum BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa ::

*Untuk kurun waktu 2017 sampai 2018 permintaan untuk melakukan sosialisasi baik OPD, maupun Masyarakat pada umumnya serta lembaga pendidikan pada khususnya sangat meningkat, ini dibuktikan dengan setiap hari senin kami selaku aparat sipil P4GN selalu menjadi irup di sekolah-sekolah. (Masnawati Rahman, SE.MM Tgl. 6 Desember 2018)*

Hal senada dikatakan pula oleh informen 4 (Kabid Pemberantasan BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Dalam pelaksanaan operasi bersinar BNNP didukung oleh instansi terkait meliputi kepolisian, polisi militer dan sat pol-pp ini dilakukan karena semakin banyaknya orang yang berani mengambil resiko untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena didorong oleh factor ikut-ikutan menggunakan narkoba serta mereka termotivasi mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar dalam waktu singkat. (Baharuddin, SE,M.Si, Tgl 6 Desember 2018)*

Hal ini diperkuat oleh informan 5 (Staf Perencanaan BNNP Sulteng) yang mengatakan bahwa :

*Dalam pengukuran kinerja BNN salah satu aspek yang diukur adalah aspek implementasi yang terdiri dari penyerapan, konsistensi capaian output dan efisiensi dan hasilnya adalah baik yaitu 87,95%. (Dewi Qadriani, SE, Tgl 6 Desember 2019).*

Untuk menunjang capaian kinerja Organisasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebanyak 15 (lima belas) indikator. Dari 15 (lima belas) indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) indikator kinerja melebihi target, 3 (tiga) indikator kinerja tercapai dan 6 (enam) indikator kinerja tidak tercapai.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan optimal berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari lima nilai Kinerja Organisasi yang dikemukakan oleh Agus Dwiyannto yaitu Produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang peneliti anggap relevan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kriteria yang berjalan dengan baik yaitu Produktifitas, kualitas layanan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Sedangkan kriteria yang belum optimal pada Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yaitu responsivitas dikarenakan :

1. Ada beberapa hambatan yang dihadapi Bidang Rehabilitasi dimana masih ada lembaga rehabilitasi yang sudah diberi penguatan namun belum beroperasi, disamping itu juga kurangnya kesadaran pecandu narkoba untuk berobat/lapor diri sehingga jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi kurang dari target, disamping itu juga adanya pasien rehabilitasi yang tidak melakukan rehabilitasi sempurna (tidak menyelesaikan rangkaian pelayanan rehabilitasi hingga selesai).
2. Untuk target jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba yang menjalani layanan pascarehabilitasi belum berjalan sebagaimana mestinya, ini menandakan bahwa program ini tdk mencapai target, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pasien yang telah melakukan program



rehabilitasi untuk melakukan program pascarehabilitasi.

### Rekomendasi

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kedepan, diharapkan ada tindak lanjut yang aktual guna memperkecil permasalahan yang timbul dari pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Perlu dibangunnya sarana dan prasarana berupa gedung Rehabilitasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba di Sulawesi tengah.
2. Adanya komitmen bagi pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah Bersih dari Narkoba (BERSINAR)
3. Agar disetiap Desa atau kelurahan perlu membentuk desa Bersinar agar kelak Sulawesi tengah imun dari penyalahgunaan narkoba.
4. Komitmen bagi pangambil keputusan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rencanakan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
5. Kerja sama dan komunikasi seluruh unsur dalam organisasi khususnya Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Pejabat Pembuat Komitmen yang terkait dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama terhadap ketua tim pembimbing Dr. Muhammad Nur Ali, M.Si dan anggota tim Pembimbing Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, M.Si semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari

### DAFTAR RUJUKAN

- Budi Winarno, MA, PhD Prof. Drs. 2013. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps
- Djam'an Satori, M.A, Prof. Dr, Aan Komariah, M.Pd, Dr. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hariadja, Marihot Tua Efendi, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media. Lembaga Administrasi Negara dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017
- Lembaga Adiministrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), No. 239/IX/6/8/2003 tentang Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta Penerbit Andi
- Nugorho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputero-Indo-Kelompok Gramedia, Edisi ketiga. Revisi 2011.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

- Peraturan Keapal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi, Nadan Narkotika Nasional Kab/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017
- Rencana Strategis (Renstra) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015 - 2019
- Sriani (2004) Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Denpasar dalam Pemungutan pph.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Wardika (2004) Kinerja Puskesmas di kota Denpasar.